

BARU SATU BULAN, OMBUDSMAN BABEL SUDAH TERIMA 23 LAPORAN DUGAAN MALADMINISTRASI

Selasa, 06 Februari 2018 - Indra

BANGKAPOS.COM--Awal tahun 2018 ini sampai dengan awal Februari ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di Bangka Belitung menangani 23 [laporan](#) terkait dugaan [maladministrasi](#).

Dengan dugaan [maladministrasi](#) tersebut yaitu tidak memberikan layanan 10 [laporan](#), penyimpangan prosedur 7 [laporan](#), penyalahgunaan wewenang 2 [laporan](#), penundaan berlarut 1 [laporan](#), diskriminasi 1 [laporan](#), dan adanya dugaan atau indikasi penerimaan imbalan berupa uang, barang dan jasa ada 2 [laporan](#).

Sedangkan substansi [laporan](#), diantaranya substansi kesehatan 7 [laporan](#), pertanian 4 [laporan](#), pendidikan 2 [laporan](#), kepegawaian 2 [laporan](#), pertanahan 1 [laporan](#), administrasi kependudukan 1 [laporan](#), infrastruktur 1 [laporan](#), dan substansi lainnya.

Terhadap 23 [laporan](#) tersebut Ombudsman telah melakukan verifikasi baik syarat formil maupun materil sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.

Terkait dengan [laporan](#) masyarakat yang membutuhkan penanganan atau penyelesaian cepat sesuai dengan syarat-syarat kualifikasinya bersifat mendesak maka akan ditindaklanjuti dengan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).

Beberapa [laporan](#) sudah selesai ditindaklanjuti dan telah selesai serta sudah ditutup.

"Kalau melihat dari mulai tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik di Bangka Belitung saat ini serta kemudahan masyarakat untuk melaporkan ke Ombudsman dengan cepat direspon dan ditindaklanjuti maka bisa diprediksi ditahun 2018 ini [laporan](#) masyarakat ke Ombudsman akan mengalami peningkatan. Di tahun 2017 lalu Ombudsman RI Babel menerima 161 [laporan](#) dengan terigister dan ditindaklanjuti sejumlah 140 [laporan](#) yang merupakan kewenangan Ombudsman, meningkat dari tahun 2016," ungkap Kepala Ombudsman RI perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Selasa (6/2/2018).

Ia berharap masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika merasakan adanya pelayanan publik yang dirasakan kurang baik diterimanya.

Mulailah membiasakan dengan berani komplain. Jangan didiamkan. Namun sebetulnya ke Ombudsman, agar bisa dikomplain terlebih dulu ke instansi atau unit yang memberikan layanannya, jika tidak direspon atau ditindaklanjuti komplain maka silahkan laporkan ke Ombudsman RI Babel dengan memenuhi persyaratan [laporan](#)nya.

Diharapkan bagi instansi atau unit ataupun pelaksana pelayanan publik agar menyediakan sarana maupun petugas unit pengaduannya.

Setiap komplain atau [laporan](#) masyarakat yang disampaikan agar secepatnya direspon maupun ditindaklanjuti, dan jangan hanya ditampung saja, sehingga menjadi berlarut-larut.

Selain itu masyarakat juga dapat melalui aduan online, sebabnya dihimbau kepada Pemerintah Daerah di Bangka Belitung agar mulailah mengaktifkan Unit Pengaduan yang terkoneksi dengan sistem Lapor- SP4N yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan dan Kemenpan RB.

"Berdasarkan review Ombudsman RI Babel yang sudah aktif dan terkoneksi tersebut adalah Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Belitung Timur, dan Pemprov, Bangka Belitung. Mudah-mudahan yang lainnya juga sudah, ditunggu konfirmasinya. Tentu tujuan dari semua itu adalah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bangka Belitung," pungkas Jumli. (*)